

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MODAL SOSIAL
UNTUK KEBERTAHANAN MASYARAKAT (STUDI PADA MASYARAKAT
NELAYAN UNTIA KOTA MAKASSAR)**

FITRAH AWALIA SALAM

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108318



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MODAL SOSIAL
UNTUK KEBERTAHANAN MASYARAKAT (STUDI PADA
MASYARAKAT NELAYAN UNTIA KOTA MAKASSAR)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

FITRAH AWALIA SALAM

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108318



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

31/05/2022

1 ccg
Smb Alumi

P/0057/1PM/2209

SAL

P

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial untuk Kebertahanan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : Fitrah Awalia Salam

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108318

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Lukman Hakim, M.Si


Hamrun, S.IP., M.Si

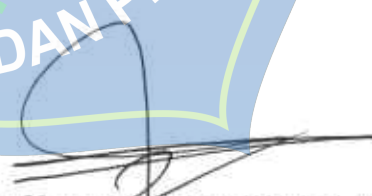
Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. H. Hyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730 727


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM : 1031 102

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:033/FSP/A.4-II/IV/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 27 April 2022



1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua) ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Hamrun, S.IP., M.Si ()
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitrah Awalia Salam

Nomor Stambuk : 105641108318

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 12 Maret 2022

Yang Menyatakan

Fitrah Awalia Salam

ABSTRAK

FITRAH AWALIA SALAM. 2022. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk Kebertahanan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar). (Dibimbing oleh Lukman Hakim dan Hamrun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk kebertahanan masyarakat nelayan Untia Kota Makassar serta modal sosial apa yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan masa penelitian, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah menjalankan perannya sebagaimana tupoksinya dalam meningkatkan modal sosial untuk kebertahanan masyarakat nelayan Untia Kota Makassar. Dimana peran pemerintah terbagi menjadi tiga peran penunjang yaitu, peran alokasi sumber daya yang mana peran ini meliputi pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah Untia Kota Makassar, didukung dengan program pemerintah seperti pemberian alat pancing, jaring, mesin, serta perahu. Peran regulator, meliputi pelatihan kerajinan tangan dan pelatihan memperbaiki mesin. Peran kesejahteraan sosial, meliputi pemberian sembako, bantuan air bersih, menyediakan lahan perumahan, serta pemberian sertifikat tanah. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat nelayan Untia berupa sikap jujur, saling percaya satu sama lain. Norma-norma sosial yang dimiliki masyarakat nelayan Untia mereka memiliki rasa toleransi, gotong royong dan saling membantu yang tinggi. Jaringan sosial dimana jaringan sosial masyarakat nelayan Untia didalamnya berupa relasi/hubungan yang baik antar sesama. Ketiga peran penunjang tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan Untia sehingga mampu meningkatkan unsur modal sosial yaitu kepercayaan dan saling membantu. Adapun intervensi pemerintah adalah pemerintah ikut andil dalam melakukan aksi-aksi sosial seperti gotong royong yang mampu meningkatkan modal sosial antar sesama masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Modal sosial, Masyarakat Nelayan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk Kebertahanan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Di Kota Makassar)”**. Yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teruntuk kepada orang tua tercinta saya Bapak **Abdul Salam Idris** Dan Ibu **Rina Maddusa** serta adik saya **Sahara Delvia Salam** yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat dan segala bantuan baik berupa materil maupun waktu untuk penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Tidak lupa pula saya mengucapkan tereimah kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing I yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan Skripsi.

2. Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kurang lebih empat tahun .
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Nuryanti, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Alimad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengeyam Pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Para Pegawai Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para Pegawai dan Staf Kecamatan Biringkanaya yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Bapak Lurah Untia dan Staf Kelurahan yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Para masyarakat Nelayan Untia Yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
12. Teruntuk Ahmad Heriawan yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta fikirannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
13. Teman- teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan, dan teman-teman "Demokrasi 2018"
15. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuan kepada penulis selama ini.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	14
1. Konsep peran pemerintah	14
2. Kebijakan pengembangan masyarakat nelayan	17

3. Konsep modal sosial	21
4. Konsep Strategi Bertahan Hidup	25
C. Kerangka Pikir	26
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpul Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Gambaran Umum Kota Makassar	36
2. Gambaran Khusus Konsentrasi Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	52

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP	90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Karyawan atau Pegawai Kecamatan Biringkanaya	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Untia	41
Tabel 4.3 Data Jumlah Masyarakat berpenghasilan rendah Dan terdampak covid 19 kelurahan Untia	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan dikaji terus menerus dan dicari solusinya. Gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari model pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya, orientasi kepada pertumbuhan dicoba untuk diseimbangkan dengan orientasi pada pemerataan, salah satunya tampak pada program spesifik penanggulangan kemiskinan.

Kissiumi (2017) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga politik dan budaya. Hal senada juga dinyatakan oleh Moestopo, bahwa kemiskinan pada hakikatnya adalah masalah kompleks yang meliputi kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, kemiskinan budaya, kemiskinan psikologis, kemiskinan religi, dan kemiskinan politik. Sementara itu Susetiwawan mengemukakan bahwa dimensi kemiskinan terdiri atas: Pertama, kemiskinan berdimensi ekonomi atau material; Kedua, kemiskinan berdimensi sosial budaya; Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Lebih lanjut Sukmana menjabarkan dimensi tersebut, dimensi

ekonomi atau material mencakup berbagai kebutuhan manusia yang bersifat material seperti sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan ini dapat dimaknai sebagai kondisi yang menghambat keluarga dalam menjalankan relasi dan fungsi sosial serta dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, yang menyakini bahwa modal sosial merujuk pada dimensi institusional, hubungan – hubungan yang tercipta, dan norma – norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Hal ini membawa implikasi besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggal dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Serta dalam rancangan Perda Kota Makassar tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2010-2030, tertera bahwa mengembangkan permukiman nelayan yang berwawasan lingkungan hidup di kawasan permukiman nelayan Untia.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah memberikan kewenangan,keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerahnya, namun sejak diberlakukan otonomi daerah sampai sekarang, masih banyak daerah-daerah yang pembangunan ekonominya tidak meningkat padahal kalau dilihat potensi daerahnya memungkinkan daerah tersebut ekonominya meningkat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan sosial. Sebagai satu kesatuan sosial masyarakat nelayan berkembang, tumbuh, dan hidup di daerah pesisir atau daerah pantai. Nelayan sering dipersepsi sebagai profesi usang yang kerap dililit utang. Posisi nelayan tidak hanya harus kuat menahan gempuran ombak lautan. Permasalahan nelayan tidak hanya harus kuat menahan gempuran ombak di lautan, tetapi juga harus mampu bertahan ditengah gemuruh kehidupan modernitas yang terkadang menghempas jauh lebih keras dari ombak di lautan. Permasalahan nelayan tidak hanya berada pada titik bagaimana memperoleh ikan di laut lepas, tetapi persaingan keras juga harus dihadapinya dalam merebut pasar penjualan hasil tangkapannya (Rassanjani, Harakan, Pintobtang, & Jermisittiparsert, 2019).

Pada tahun 1998 warga Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang direlokasi pemerintah Kota Makassar ke kawasan permukiman Nelayan di Kelurahan Untia. Warga yang direlokasi dan dipindahkan ke Kelurahan Untia bermata pencaharian sebagai nelayan. Itulah mengapa kampung tersebut dinamakan kampung nelayan dan disebut Untia karena dahulu adalah merupakan area atau kawasan perkebunan pisang (Adefrika.A 2021).

Masyarakat nelayan Untia merupakan Nelayan yang berasal dari Pulau Lae-Lae yang direlokasi ke daerah Untia di Kecamatan Biringkanaya. Karena direlokasikan masyarakat nelayan Untia butuh waktu untuk beradaptasi dengan daerah sekitar tempat tinggal masyarakat nelayan. Nelayan untia dalam tanda kutip belum sejahterah atau masih dalam garis kemiskinan. Hal tersebut didasari atas pemikiran tentang potensi, kondisi serta peluang yang dihasilkan.

Keberadaan nelayan pulau Lae-Lae yang sekian lama hidup pada sebuah pulau, dihadapkan dengan permasalahan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Relokasi dilakukan karena Pulau Lae Lae di lirik menjadi pulau wisata. Tujuan relokasi yang dilakukan pemerintah selain menjadikan Makassar sebagai Kota Pantai, juga bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan yang tergolong rendah di Pulau Lae-Lae (Suryaningsih,2020).

Rencana relokasi pada masa itu (1998), menyebabkan terjadinya ketegangan diantara para warga nelayan yang berada di Pulau Lae-Lae. Konflik yang terjadi disebabkan karena adanya dua pendapat yang berbeda mengenai rencana relokasi tersebut. Ada warga nelayan yang menyambut baik relokasi yang dilakukan pemerintah tersebut begitupun sebaliknya ada warga yang kontra akan relokasi tersebut. Oleh karena itu, relokasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar memecahkan komunitas nelayan di pulau Lae-Lae pada saat itu. Sekitar 40% nelayan Pulau Lae-Lae yang berhasil di relokasi ke wilayah pesisir atau daratan, sedangkan sisanya 60% tetap bertahan di Pulau Lae-Lae. Relokasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pemindahan 40KK, tahap kedua 60KK, tahap ketiga 43KK. Setiap tahap pemindahan dilakukan berelang waktu selama seminggu dengan bantuan pemerintah serta dibantu oleh aparat keamanan untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi bentrok di antara warga yang direlokasi dengan warga yang menolak direlokasi (suryaningsih, 2020)

Di Kota Makassar, peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial sangat berperan penting bagi masyarakat nelayan Untia sebagai strategi untuk bertahan hidup. Pengelolaan modal sosial merupakan strategi yang banyak diandalkan oleh masyarakat nelayan. Dengan jiwa solidaritas, loyalitas, tanggung jawab, dan kepemilikan yang tinggi. Para anggota keluarga bekerja sama membina kerukunan, meningkatkan keterampilan, investasi, dan tabungan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka (Suryaningsih, 2020).

Modal sosial Pada masyarakat nelayan Pulau Lae-Lae sebelum di realokasikan ke Untia dengan kondisi kesejahteraan yang masih kurang baik ditentukan dengan tingkat kepercayaan antara sesama masyarakat nelayan. Tingkat kepercayaan yang ada diwujudkan dalam perilaku saling bantu dan kerjasama. Tanpa modal sosial yang baik, masyarakat nelayan pulau Lae-Lae tidak mungkin memperoleh keuntungan material atau keberhasilan yang optimal. Sehingga pemerintah melakukan kerjasama yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Untia.

Maka dari itu, sangat penting dan menarik untuk dikaji karena berbicara mengenai bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial sebagai keberlanjutan hidup masyarakat nelayan untia tidak lepas dari tujuan dipindahkannya masyarakat nelayan Lae-Lae ke daerah Untia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan Lae-Lae yang tergolong rendah dan menjadi pertanyaan apakah sampai sekarang pemerintah setempat masih melakukan pengawalan/menjalankan perannya setelah pemindahan tersebut. Dan modal sosial seperti apa yang digunakan masyarakat nelayan Untia untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar bisa bertahan hidup.

Melihat dari latar belakang masalah yang ada, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai tentang peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial yang digunakan masyarakat Nelayan untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi landasan penulis untuk mengangkat judul "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial untuk Keberlanjutan Masyarakat (Studi pada masyarakat Nelayan Untia Di Kota Makassar)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberterahan masyarakat nelayan Untia Kota Makassar?
2. Modal sosial seperti apa yang digunakan masyarakat nelayan Untia Kota Makassar Untuk Bertahan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberterahan masyarakat nelayan Untia di Kota Makassar.
2. Mengetahui modal sosial apa yang digunakan masyarakat nelayan Untia Kota Makassar Untuk bertahan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan akademik mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberterahan hidup masyarakat nelayan Untia.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memecahkan problema yang terjadi selama proses keberterahan hidup masyarakat nelayan Untia sehingga masyarakat mampu memperoleh solusi yang efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai salah satu bahan acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu ini penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Solikaton, Nuning Juniarsih, 2018	Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk modal sosial yang ada di Desa Maria antara lain : 1) Jaringan, yang mana didalam jaringan sosial terdapat kerjasama, sikap gotong royong, partisipasi; 2) kepercayaan yang dimiliki masyarakat Maria yang menimbulkan rasa memiliki bersama dan

kejujuran; 3) Norma – norma sosial dan nilai – nilai yang telah menjadi alat pengontrol sikap dan tingkah laku anggota masyarakat dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar anggota masyarakat. Peran modal sosial sebagai strategi bertahan hidup : 1) terjalannya hubungan/interaksi sosial antar anggota masyarakat yang dapat menumbuhkan persaudaraan, kekeluargaan dan kekerabatan; 2) kuatnya solidaritas sosial di masyarakat; 3) kepercayaan yang ada di masyarakat menumbuhkan sikap saling tolong menolong; 4) melestarikan tradisi didalam kehidupan masyarakat Maria; dan 5) nilai dan norma sosial yang berperan



			sebagai alat kontrol sosial.
2.	Wijaya, Yudha Sena, 2019	Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Pemukiman Kumuh: Studi Di RT 16, RW 04, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat RT 16, RW 04, Kelurahan Rawaterate, Jakarta Timur ternyata memiliki modal sosial yang memadai sehingga mereka mampu bertahan hidup di pemukiman kumuh Jakarta. Mereka memiliki bentuk-bentuk modal sosial yang diperlukan untuk bertahan hidup, yakni kepercayaan sosial (social trust), jaringan sosial (social network) dan norma. Selain itu, mereka mengimplementasikan modal-modal sosial tersebut dalam strategi-strategi untuk bertahan hidup seperti pinjam meminjam uang dan sistem tabungan.

3.	Kondjol & Pieters, 2010	Peranan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas nelayan marginal di Kabupaten Sorong Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada enam karakteristik internal (a) keterbelakangan dan tradisi subsistensi; (b) Sedikitnya pengalaman melaut dan tradisi berniaga; (c) rendahnya sarana dan prasarana industri, transportasi dan jaringan pasar perikanan; (e) rendahnya akses peralatan modern dan tingkat penguasaan teknologi; dan (f) sedikitnya pendapatan usaha nelayan, permodalan, dan curahan kerja nelayan. Selain itu ada lima bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat nelayan asli Papua selama ini, yaitu (a) subordinasi dari jaringan pemasaran hasil perikanan laut dan air payau; (b) sistematisasi keputusan
----	-------------------------	---	--

			atas jaringan usaha perdagangan laut; (c) segregasi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan politik; (d) pelemahan akses dalam partisipasi politik dan artikulasi kepentingan; dan (e) eksploitasi sumber daya dan monopoli alokasi anggaran publik. Pada implementasi kebijakan dalam skema pemberdayaan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan kebijakan afirmatif cenderung hanya dapat diterapkan untuk mengatasi akar permasalahan marjinalitas internal, tetapi tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk segera mengatasi akar permasalahan marginalisasi yang dialami masyarakat
--	--	--	---

nelayan lokal Papua selama ini. Pilihan kebijakan afirmatif parsial semacam ini disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha perikanan dan nelayan pendatang tetap memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong Selatan secara umum, walau dalam kenyataan mereka secara struktural membuat masyarakat nelayan pribumi Papua termarginalisasi di sektor perikanan laut dan air payau. Skema pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan lokal oleh Pemerintah Daerah sudah sangat baik, tetapi tidak dapat diimplementasi secara integral.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, tetapi berdasarkan publikasi studi tidak ada yang secara tegas menyebutkan peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan masyarakat (studi pada masyarakat nelayan Untia Kota Makassar). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan masih relatif baru.

B. Teori dan Konsep Penelitian

1. Konsep Peran Pemerintah

Secara etimologis pemerintah berasal dari bahasa Yunani *kubernan* atau nahkoda kapal, artinya menap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang di tetapkan. Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan komunikasi peran seat seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi (Soemandar 1985; 1). Pemerintah adalah sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab atau memiliki wewenang dalam menjalankan sebuah negara. Pemerintah

merupakan badan-badan yang bertugas menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan.

Peran pemerintah yang dikemukakan (Sondang P. Siagian 2009:132) peran pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan sebagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin kemandirian kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010:21).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. Peran pemerintah adalah upaya secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara aktif terencana menuju masyarakat modern. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.

Soerjono Soekanto (2002:243) syarat-syarat mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.

J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia. Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah untuk mencapai tujuan yang ingin dikehendaki.

Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah :

1. Peran alokasi sumber daya.
 2. Peran regulator.
 3. Peran kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan Pengembangan Masyarakat Nelayan

Melalui pendidikan, warga masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupannya. Pengembangan pendidikan sumberdaya manusia adalah membangun manusia agar mampu untuk membangun dirinya sendiri, dalam arti mengenali potensi diri, kendala yang dihadapi dan mampu memformulasikan solusi kendala tersebut, tentunya dengan bantuan fasilitator. Dimana pemerintah

merupakan sebagai fasilitator utama dalam pemberdayaan pengembangan masyarakat, maka pemerintah harus melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kondisi masyarakat nelayan tentunya dapat memberikan peranan kepada setiap individu masyarakat nelayan bukan hanya sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Kebijakan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) nelayan tangkap adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia yang ditujukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan nelayan di Indonesia. Adapun program ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Republik Indonesia Nomor Per/41/11 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan tahun 2011. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap adalah salah satu bagian dari peraturan menteri yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di pedesaan sesuai dengan potensi sumber daya ikan.
2. Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di pedesaan.
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan.

Dalam upaya pengembangan kebijakan masyarakat nelayan terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah Nasional

Kebijakan pemerintah nasional dalam pengembangan masyarakat nelayan yaitu program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK). Namun, program-program yang sudah dilakukan tidaklah membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik, karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu. Oleh karena itu, perlu sekali diterbitkan sebuah kebijakan sosial yang berisikan keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sebagaimana yang mereka butuhkan, kebijakan tersebut juga harus didukung oleh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dimana terdapat masyarakat miskin khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Resnawaty(2016) Kegagalan penanganan kemiskinan nelayan selama ini, disamping kurangnya keterpaduan, juga terdapatnya

berbagai kelemahan dalam perencanaan. Untuk itu dalam proses perencanaan harus dibutuhkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perumusan sasaran yang jelas, berupa; hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan.
2. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan.
3. Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas.
4. Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada dilapangan, dan apabila terjadi permasalahan diluar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.
5. Pendampingan, monitoring dan evaluasi, pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pasca kegiatan,

sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan pemerintah Kota

Tentang pengembangan kebijakan pemerintah Kota khususnya bagi masyarakat nelayan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pemberian bantuan yang diberikan seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemberian beras miskin (Raskin). Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diperlukan dalam hal ini adalah modal sosial yakni perlunya kesinambungan masyarakat nelayan dalam berusaha seperti perlu adanya organisasi nelayan yang mampu menghimpun serta memberikan bekal pengetahuan kepada mereka agar kelak mereka setelah diberikan ketrampilan, bantuan permodalan maka mereka akan hidup mandiri serta tidak akan tergantung lagi kepada pemerintah.

3. Konsep Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan dengan sifat-sifat organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi (Putnam 1993). Modal sosial merupakan aset yang terbangun dan tumbuh disetiap diri individu sebagai hasil dari hubungan masyarakat yang baik. Modal sosial memiliki berbagai pengertian dari para ahli akan tetapi pada substansinya tetap sama. Misalnya (Fukuyama, 2014) mengatakan bahwa modal sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai rangkaian nilai-

nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama diantara mereka. Terminologi modal memiliki tiga bentuk. Pertama, modal ekonomi yang dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda-benda, barang dan sejenisnya yang dapat dipandang dan digunakan bagi keperluan investasi. Kedua, modal kultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan dan yang ketiga, modal sosial terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial diantaranya terinstitusionalisasi dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan, Bourdieu (dalam Hasbullah,2006:7).

Sebagai sumber daya, modal sosial dengan aspek kepercayaan, nilai dan jaringan dapat memberikan kekuatan atau daya serta dapat mengaktifkan berbagai aktifitas dalam berbagai kondisi sosial dalam masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan dalam lingkup birokrasi atau pemerintahan. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial adalah tentang solidaritas, kepercayaan diri berasal dari hubungan sosial yang melibatkan keluarga, teman, rekan kerja dan lain-lain (Scheiber,2014:2).

Dari berbagai pengertian modal sosial di atas dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah modal yang dimiliki manusia yang mengacu kepada perilaku yang kooperatif pada organisasi sosial atau dalam lingkungan masyarakat dengan jaringan sosial, norma-norma, serta

kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama yang menguntungkan untuk mendorong sehingga terciptanya keteraturan dan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (

a. Norma dan modal sosial

Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan secara bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma yang mampu menghasilkan modal sosial dalam masyarakat mesti memperhatikan aspek kejujuran, pemenuhan tugas dan kesediaan untuk saling menolong serta komitmen bersama. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarka sejarah kerjasama masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama. Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial

b. Jaringan sosial dan Modal Sosial

jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan antara individu dan komunitas. Keterkaitan didalamnya ada beragam tipe kelompok baik pada tingkat lokal maupun di tingkat lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan untuk menjaga sinergi dan kekompakan. Adanya jaringan-jaringan hubungan sosial antar individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama, karena

ia mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik, itulah yang dikatakan putnam (dalam Simarmata,2009:32) tentang jaringan sosial sebagai salah satu elemen dari modal sosial. Jaringan dipandang sebagai mekanisme penting untuk mendorong perilaku kooperatif,meningkatkan efisiensi masyarakat dengan menghasilkan tindakan terkoordinasi demi memenuhi tujuan bersama.

Jaringan sosial terdiri dari lima unsur yang meliputi partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama, dan keadilan. Konsep partisipasi dapat diartikan sebagai alat untuk mengembangkan diri sekaligus tujuan akhir. Dalam jaringan sosial, partisipasi memegang peranan yang cukup penting, karena kerjasama yang ada dalam komunitas dapat terjadi karena adanya partisipasi individu-individu. Solidaritas adalah faktor utama dalam merekatkan hubungan sosial dalam sebuah komunitas. Unsur lainnya dalam jaringan sosial adalah kerjasama. Kerjasama adalah jaringan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Hampir semua kelompok manusia dapat ditemui adanya pola-pola kerjasama dan tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang menyukai hidup bersama daripada hidup sendiri.

c. Kepercayaan sebagai Modal Sosial

kepercayaan adalah ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih baik. Fukuyama (2014:VII). Karena itu kepercayaan menjadi penting dalam menopang modal sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. Sebagaimana menurut James Coleman (dalam Hasbullah, 2006:36) menyatakan sistem yang terbentuk dari rasa saling percaya merupakan komponen modal sosial sebagai basis dari kewajiban-kewajiban dan haraoan masa depan, yang oleh Putnam (2009) lebih jauh mengemukakan bahwa kepercayaan atau perasaan saling mempercayai merupakan sumber kekuatan modal sosial yang dapat mempertahankan keberlangsungan perekonomian yang dinamis dan kinerja pemerintahan yang efektif.

4. Konsep Strategi Bertahan Hidup

Strategi berasal dari bahasa Yunani yakni *strategos*, yang memiliki arti kepemimpinan dalam ketentaraan. Dalam perkembangannya, definisi konsep strategi semakin banyak dan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus mampu membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir (sasran atau objektif); ini adalah masalah kegiatan operasi organisasi (Rivai dan Darsono, 2015).

Strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. Strategi juga lebih bertumpu pada bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama, kemudian menjadi yang lebih baik.

Sedangkan strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang menengah ke bawah secara sosial ekonomi. Melalui strategi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, bisa menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber yang lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup menerapkan pola nafkah ganda yang merupakan bagian dari strategi ekonomi.

C. Kerangka Pikir

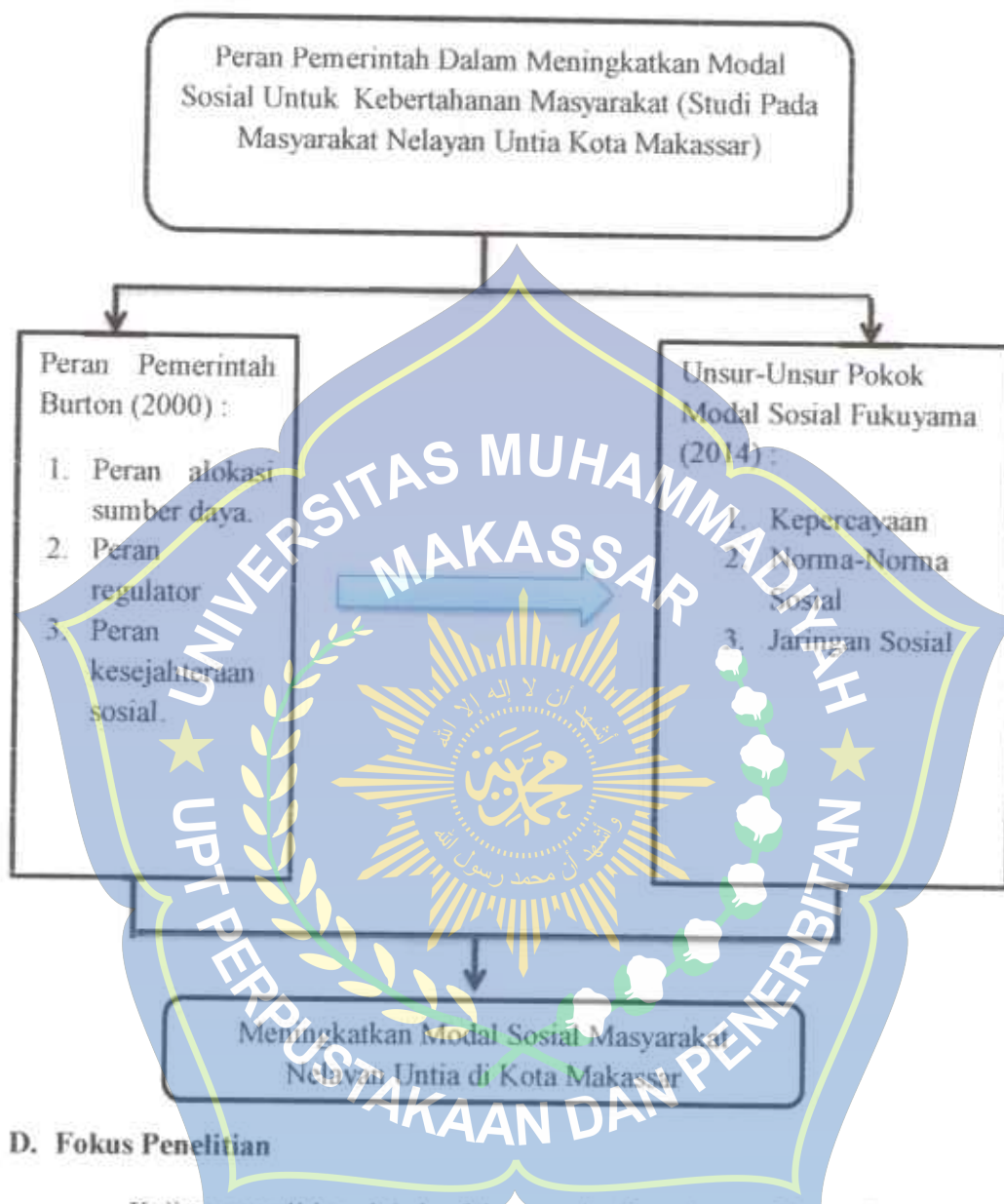
Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk Kebertahanan Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar. Berdasarkan teori Burton (2000) yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial. Dimana ketiga indikator ini mampu menjawab apa yang ingin menjadi capaian penulis yaitu untuk melihat atau mengetahui

Bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat nelayan setelah pemindahan dari pulau Lae –Lae. Juga indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi bahan penelitian penulis sehingga dengan mudah mengetahui peran pemerintah Serta dalam meningkatkan modal sosial masyarakat nelayan Untia. Selanjutnya, pada teori Fukuyama (2014) yang terdiri dari kepercayaan, norma-norma sosial dan jaringan sosial adalah untuk mengetahui modal sosial seperti apa yang digunakan masyarakat nelayan Untia untuk bertahan hidup

Pada penelitian ini teori tersebut akan digunakan dikarenakan fenomena ataupun permasalahan dalam teori ini sangat sesuai dengan skripsi saya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kota makassar dalam meningkatkan modal sosial masyarakat nelayan Untia.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini berfokus pada Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk Kebertahanan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Di Kota Makassar) dan modal sosial yang digunakan untuk bertahan hidup.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu :

1. Peran alokasi sumber daya mencakup penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian sehingga mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan Untia.
2. Peran regulator adalah pengaturan program yang dibutuhkan masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial.
3. Peran kesejahteraan sosial mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial.
4. Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan yang tumbuh dalam diri masyarakat nelayan Untia sehingga mampu berinteraksi antar sesama.
5. Norma adalah aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat nelayan Untia yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan hidup.
6. Jaringan sosial adalah relasi antar sesama masyarakat nelayan Untia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di Daerah Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Dan waktu penelitian pada tanggal 24 Januari Sampai 1 Maret 2022.

Adapun pertimbangan menjadikan lokasi penelitian karena saya melihat atau menemukan bahwa di Untia ini terdapat permasalahan atau fenomena yang sesuai dengan judul yang saya angkat yaitu Untia merupakan tempat atau daerah dipindahkannya masyarakat pulau Lae-Lae dengan tujuan selain menjadikan pulau Lae-Lae sebagai tempat wisata adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang tergolong rendah, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap masyarakat nelayan Lae-Lae setelah dipindahkan ke Untia dari tahun 1998 sampai sekarang apakah pemerintah masih melakukan pengawalan setelah pemindahan tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk kebertahanan Masyarakat yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis dari hasil *observasi*, wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti yaitu Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk keberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data yang tersedia dalam pengembangan masyarakat nelayan mendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang mampu menjelaskan sebenarnya berdasarkan pengalaman yang dialami tentang objek penelitian yaitu Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk keberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar). Adapun informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Keterangan	jumlah
1.	Hj. Zanty Susilawati, S.Pi, M.Si	ZS	Kepala Bidang perikanan	1
2.	Muhammad Syarif, SE, M.Si	MS	Kasubag Umum dan kepegawaian Kecamatan Untia Kota Makassar	1
3.	Alwan Januar Setiawan S.STP	AJS	Lurah Untia Kota Makassar	1
4.	Rohani	R	Masyarakat Untia Kota Makassar	1
5.	Maming	M	Masyarakat nelayan Untia Kota Makassar	1
6.	Dg. Nompo	DN	Masyarakat nelayan Untia Kota Makassar	1
7.	Sl. Nyemba	SN	Masyarakat nelayan Untia Kota Makassar	1
8.	Ahmad	A	Masyarakat	1
9.	Muh. Basir	MB	Masyarakat nelayan Untia Kota Makassar	1
Total Informan				9

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang di dapatkan penulis dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Modal Sosial Untuk Kebertahanan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar).
2. Wawancara, dimana penulis berkomunikasi langsung dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
3. Dokumentasi, pengumpulan data dalam bentuk gambar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, dalam tahap ini penulis akan melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data, penulis akan mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display data* atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah

dalam bentuk teks naratif berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang didapatkan.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) dalam penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Penulis akan melakukan perpanjangan masa penelitian jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu penulis dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Penulis akan menghubungi kembali para informan dan pengumpulan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum

dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di Pemukiman Nelayan Untia valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum dan khusus mengenai lokasi penelitian dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial Untuk keberlanjutan masyarakat (studi pemukiman nelayan Untia Kota Makassar) serta modal sosial yang digunakan masyarakat nelayan Untia untuk bertahan hidup.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kota Makassar yang mencakup letak geografis dan administratif wilayah Kota Makassar. Gambaran khusus lokasi penelitian meliputi Kecamatan Biringkanaya dan pemukiman Nelayan Untia (Kelurahan Untia) yang meliputi kondisi geografis, penduduk, potensi ekonomi serta data informasi penting lainnya yang secara keseluruhan memberikan gambaran yang utuh tentang Kecamatan Biringkanaya dan pemukiman Nelayan Untia (Kelurahan Untia).

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah sebuah kota madya sekaligus ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota madya ini adalah kota terbesar pada $5^{\circ}8'S$ $119^{\circ}25'E$ koordinat di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar. Secara administratif kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25m dari permukaan laut. Penduduk kota Makassar pada tahun 2000

adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari 557.050 jiwa laki-laki dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65%.

- a) Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene Kepulauan di sebelah Utara, Kabupaten Maros di sebelah Timur dan Kabupaten Gowa di Sebelah Selatan.
- b) Pembagian wilayah : Kota Makassar dibagi menjadi 14 Kecamatan, 143 Kelurahan, 885 RW dan 4446 RT.
- c) Kondisi geografis : Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai 32°C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu Sungai Tallo yang bermuara di sebelah Utara Kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian Selatan Kota.
- d) Luas wilayah : 128,18 km² (total 175,77 km²).
- e) Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Kota Makassar kebanyakan dari Suku Makassar sisanya berasal dari Suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama islam.

Luas wilayah Kecamatan : 1. Tamalanrea 31,84 km², 2. Biringkanaya 48,22 km², 3. Manggala 24,14 km², 4. Panakkukang 17,05 km², 5. Tallo 5,83 km², 6. Ujung Tanah 5,94 km², 7. Bontoala 2,10 km², 8. Wajo 1,99 km², 9. Ujung Pandang 2,63 km², 10. Makassar 20,21 km², 11. Rappocini 9,23 km², 12. Tamalate 20,21 km², 13. Mamajang 2,25 km², 14.

Mariso 1,82 km². Kepadatan penduduk 6.645,5/ km², dan jumlah penduduk 1,168,258 jiwa.

2. Gambaran Khusus Konsentrasi Lokasi Penelitian

Gambaran khusus lokasi penelitian adalah Kecamatan Biringkanaya Jl. Ir. Sutami No.100 Bulurokeng dan pemukiman nelayan Untia Kelurahan Untia Jl. Salodong, Makassar Sulawesi Selatan.

Secara geografis Kecamatan Biringkanaya memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 65% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Biringkanaya berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu bagian wilayah timur kota Makassar dengan memiliki luas lahan seluas 48,22 Km. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Biringkanaya berkisar 26-30 C°. Sedangkan dilihat dari curah hujan berkisar 2000 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 30 hari. Kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 140.031 jiwa, yang terdiri dari 71.038 jiwa laki-laki dan 68.993 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Biringkanaya saat ini mencapai sekitar 34.222 KK. Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan pada tahun 2019 dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Terdapat 12 kelurahan yaitu, Bulurokeng, Untia, Sudiang, Pai, Daya, Paccerakang, Sudiang Raya, Bakung, Laikang, Berua, Katimbang.

Secara administratif kecamatan Biringkanaya dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
 Bagian Utara : Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
 Bagian Timur : Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
 Bagian Barat : Kecamatan Tallo Kota Makassar

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar



a. Visi Kecamatan Biringkanaya

Mendukung terwujudnya kota dunia yang berbasis potensi lokal.

b. Misi Kecamatan Biringkanaya

1. Mendorong penguatan dan partisipasi masyarakat pada semua aspek pembangunan.

2. Mendukung pemerintah kota untuk mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pelayanan prima Kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kualitas SDM serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
6. Meningkatkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan.

Table 4.1 Jumlah Karyawan atau Pegawai Kecamatan Biringkanaya

No.	P	L	Jumlah
1.	8	13	21

Untia terletak di Kecamatan Biringkanaya yang juga memiliki luas wilayah terkecil. Kelurahan Untia berasal dari kata Untia yang artinya pisang. Disebut Untia karena dahulu merupakan areal atau kawasan perkebunan pisang. Kelurahan ini terdiri dari dua lingkungan, yaitu :

1. Untia Toa meliputi RW 003 dan RW 004. Kampung Untia Toa adalah kampung yang sudah lama ada jauh sebelum kelurahan Untia terbentuk.

Oleh karena itu disebut kampung Untia Toa yang artinya kampung Untia lama.

2. Kampung nelayan meliputi RW 001, RW 002 dan RW 005. Warga yang dipindahkan ke kelurahan Untia tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karena itu kampung tersebut dinamakan kampung nelayan.

Secara administrasi Kelurahan Untia dibatasi oleh :

Sebelah utara : Berbatasan dengan laut selat Makassar dan kabupaten Maros.
 Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Bira
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng
 Sebelah Barat : berbatasan dengan laut selat Makassar

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Untia

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
1.	Untia	1.086	987	2.073	11,0

Kelurahan Untia memiliki luas wilayah sekitar 2,98 km².

Kelurahan ini merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Bulurokeng. Pemukiman nelayan Untia merupakan program kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan walikota Malik B. Masry tahun 1998 yang merelokasi pemukiman nelayan di Pulau Lae-Lae. Untia resmi menjadi kelurahan definitif pada tahun 2000 dan menjadi kelurahan ke-143, serta menjadi

kelurahan terakhir yang terbentuk di Kota Makassar. Permukiman ini diharapkan dapat menjadi pemukiman nelayan percontohan nasional.

B. Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Makassar terkhusus kepada Dinas perikanan Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, dan Kelurahan Untia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan masyarakat nelayan Untia dengan program-program yang telah dikonsepsikan sangat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat nelayan Untia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial antar sesama. Baik dari segi pembangunan ekonomi yang merupakan hal terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat lokal.

Sehingga Untuk mencapai bagaimana peran pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan modal sosial masyarakat nelayan Untia untuk keberlanjutan hidup apakah pemerintah tetap melakukan pengawasan setelah pemindahan masyarakat nelayan dari Pulau Lae-Lae, penulis secara garis besar memaparkan ada beberapa peran penunjang pemerintah diantaranya peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial.

1. Peran alokasi sumber daya

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran alokasi sumber daya mencakup penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian sehingga mampu memberikan pelayanan kesejahteraan

sosial bagi masyarakat nelayan Untia. Dimana pada peran alokasi sumber daya ini mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Untia untuk penggunaan tertentu. Misalnya sekarang di Untia sedang dibangun Newport, dengan adanya newport ini masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya. Masyarakat nelayan sudah tidak jauh-jauh keluar untuk menjual hasil tangkapannya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara penulis dengan pemerintah setempat. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Lurah Kelurahan Untia sebagai berikut :

“Apalagi disini ada pelabuhan perikanan yang nantinya akan beroperasi, disini akan dibuka tempat pelelangan jadi masyarakat disini sudah tidak jauh-jauh lagi menjual ikannya ke Paotere atau kemana-kemana karena akan ada pelabuhan yang beroperasi pelelangannya” (Hasil wawancara dengan AJS pada tanggal 25 Januari 2022).

Dilanjut dengan hasil observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat nelayan Untia. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“Fasilitas yang diberikan pemerintah itu memang ada. Kami diberikan bantuan berupa mesin dan alat tangkap bahkan ada juga yang diberikan perahu. Fasilitas yang diberikan pemerintah sangat penting bagi kami untuk bertahan hidup dimana kami juga sesama masyarakat kadang saling tumpang menumpang kapal.” (Hasil wawancara dengan R pada tanggal 25 Januari 2022).

Serupa dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan Untia sebagai berikut :

“Dulu Bantuan yang diberikan pemerintah ada pemberian mesin katinti perahu, jaring, tetapi sekarang agak terhambat dengan adanya corona”. (Hasil wawancara dengan DN pada tanggal 1 Maret 2022).

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pada peran alokasi sumber daya pemerintah mampu memberikan fasilitas yang baik terhadap masyarakat nelayan Untia dalam artian pemerintah masih melakukan pengawasan setelah pemindahan, tetapi sekarang sedikit terhambat dengan adanya covid-19.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan Untia sebagai berikut :

“Kalau masalah peran pemerintah disini itu bagus, cuman ini ada covid 19 jadi agak terhambat juga aktivitas melaut”. (Hasil wawancara dengan DN pada tanggal 1 Maret 2022).

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya covid 19 itu sangat berpengaruh pada penghasilan dan aktivitas nelayan. Dengan itu pemerintah harus lebih sigap dalam menyalurkan bantuan-bantuan serta program yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat nelayan Untia yang relevan dengan unsur modal sosial.

2. Peran regulator

Peran regulator adalah pengaturan berupa program yang dibutuhkan masyarakat nelayan Nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial. Pemerintah sebagai regulator yang di maksud dalam penelitian ini adalah setiap usaha dan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui program yang berorientasi kepada peningkatan modal sosial yang digunakan masyarakat nelayan Untia untuk keberlanjutan hidup dan kesejahteraan hidup.

Adapun peran pemerintah sebagai regulator dalam meningkatkan modal sosial masyarakat nelayan Untia adalah dengan mengadakan program-program pemberdayaan masyarakat seperti, pelatihan memperbaiki mesin tangkap ikan. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan modal sosial sebagai strategi keberlanjutan masyarakat nelayan Untia adalah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasubag umum dan kepegawaian sebagai berikut :

"Kami melakukan atau memberikan program pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan kerajinan tangan, membentuk kelompok usaha tani agar hal ini juga dimaksudkan untuk membuat masyarakat Untia antar sesama dapat lebih saling mengenal satu sama lain yang tidak lepas dari peningkatan modal sosial itu sendiri". (Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 25 Januari 2022).

Selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu kepala bidang perikanan dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar sebagai berikut :

"Pemerintah kota khususnya dinas perikanan Kota Makassar dalam peningkatan kesejahteraan serta modal sosial masyarakat Nelayan dinas perikanan memberikan banyak program, ada beberapa kegiatan antara lain, bantuan sarana prasarana terhadap nelayan seperti contohnya pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring, pancing, perahu lengkap dengan mesin. Jadi itu semua adalah upaya pemerintah kota dalam hal ini dinas perikanan Kota Makassar dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Kegiatan rutin dinas terhadap nelayan melakukan sosialisasi tentang pelatihan. Contoh tahun 2022 ini akan ada pemberian pelatihan kepada nelayan seperti pelatihan skill training perbaikan mesin perahu. Kenapa dilakukan skill training terhadap nelayan seperti perbaikan mesin agar nelayan itu bisa mandiri, tidak keluar lagi uangnya untuk memperbaiki mesin kapal yang rusak. Ada juga sosialisasi cara menangkap ikan yang ramah lingkungan serta sosialisasi pemanfaatan alat tangkap". (Hasil wawancara dengan ZS pada tanggal 28 Januari 2022).

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan

Untia sebagai berikut :

"Kita dibagi dalam lima kelompok yaitu kelompok rawe dasar, jaring rahmat, cumi-cumi, rappo-rappo, kakap merah yang masing-masing kelompok terdiri dari 9-10 orang. Dimana kita masing-masing kelompok ini saling berbagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah". (Hasil wawancara dengan DN pada tanggal 1 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pembentukan kelompok nelayan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menambah rasa tolong menolong satu sama lain. Tentu hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial salah satunya adalah meningkatkan rasa tolong menolong antar sesama.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan Untia sebagai berikut :

"Kalau bantuan itu dulu memang ada seperti mesin kapal, jaring. Tetapi itu sudah lama sekali, sekarang sudah tidak ada. Mungkin karena tidak bergabung juga sama kelompok-kelompok nelayan yang dibentuk pemerintah". (Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 1 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa tidak semua nelayan yang ada di Untia bergabung dalam kelompok-kelompok yang dibentuk pemerintah. Belum meratanya pembagian bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nelayan Untia.

3. Peran kesejahteraan sosial

Peran pemerintah sebagai kesejahteraan sosial yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah mencakup kebijakan-kebijakan yang

mendorong pemerataan sosial masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial.

Adapun hasil observasi dan wawancara penulis dengan Bapak Kasubag Umum dan kepegawaian Kecamatan Biringkanaya sebagai berikut :

“pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong pemerataan sosial bagi masyarakat nelayan Untia untuk meningkat modal sosial, kami telah melakukan/menjalankan beberapa program seperti, pemberian sembako, bantuan air bersih, serta menyiapkan lahan rumah”. (Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 25 januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan Untia sebagai berikut :

“Dengan adanya covid-19 ini sangat berdampak pada perekonomian, bantuan pemerintah juga ikut lambat tersalurkan”. (Hasil wawancara dengan DN pada tanggal 01 Maret 2022).

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

“Kalau disini mengenai lahan perumahan baru sedikit yang dapat sertifikat tanah, belum semua.” (Hasil wawancara dengan A pada tanggal 2022).

Selaras dengan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan Untia sebagai berikut :

“Disini memang belum semua dapat sertifikat rumah, tapi kalau saya sudah dapat, dan sudah menetap. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di pulau itu sudah agak lumayan bagus. Pengawasan pemerintah juga setelah pemindahan itu cukup bagus, sampai sekarang kami masih di pantau dan diperhatikan.

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas perikanan, Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Untia sudah mampu menjalankan perannya sebagai mana mestinya mulai dari peran alokasi sumber daya, peran regulator dan peran kesejahteraan sosial. Dimana Banyaknya program-program yang telah disebutkan diatas dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat mampu meningkatkan modal sosial masyarakat nelayan Untia. Karena permasalahan awal dalam modal sosial masyarakat nelayan Untia adalah kesejahteraan yang merupakan bentuk kepercayaan dan saling membantu. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan Untia dengan program yang dibuat pemerintah tentu hal tersebut meningkatkan rasa percaya dan saling membantu antar sesama yang merupakan bagian dari modal sosial masyarakat nelayan Untia.

Agar mengetahui modal sosial apa yang digunakan masyarakat nelayan Untia Kota Makassar sebagai strategi bertahan hidup. Adapun modal sosial yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah seperti yang telah dikemukakan oleh Fukuyam (2014) bawa modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma-norma sosial, dan jaringan sosial.

1. Kepercayaan

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Rasa saling mempercayai yang

tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat nelayan Untia Kota Makassar, sebagai berikut :

“ Kami disini karena sama-sama orang yang berasal dari pulau jadi kami sudah menganggap keluarga satu sama lain, kalau berbicara kepercayaan tentu disini kami saling percaya, saling jujur, bahkan saling pinjam meminjam karena kami sudah percaya satu sama lain, ditambah dengan adanya program-program pelatihan yang dibuat pemerintah tentu lebih meningkatkan rasa percaya kami karena lebih dapat saling mengenal.” (Hasil wawancara dengan M pada tanggal 25 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa modal sosial dalam hal kepercayaan yang dijalin masyarakat nelayan Untia Kota Makassar sudah sangat baik. Kepercayaan yang dibangun bersama menimbulkan sikap saling membantu. Sesuai dengan teori Fukuyama yang mana kepercayaan merupakan suatu kemampuan masyarakat dalam bekerja sama untuk tujuan umum dalam kelompok. Hal ini sebanding dengan apa yang penulis dapatkan di lapangan.

2. Norma-norma sosial

Norma sosial sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Artinya, kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial

selanjutnya tidak akan terjadi. Kalau dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan maka akan muncul pertukaran yang kedua dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pula. Kalau prinsip ini dipegang teguh oleh kedua belah pihak maka dari situlah akan muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran itu (Fukuyam 1995).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Untia sebagai berikut :

“Sesama masyarakat sekitar kami memiliki sikap toleransi yang tinggi, tolong menolong, kami juga tentu tidak lepas dari aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah”. (Hasil wawancara dengan R pada tanggal 25 Januari 2022).

Selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaran Kecamatan Biringkanaya sebagai berikut :

“Kami selalu mengingatkan pentingnya gotong royong dan saling menghargai”. (Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 25 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintah setempat selalu melakukan aksi gotong royong bersama masyarakat.

Dilanjut dengan wawancara dengan masyarakat nelayan Untia sebagai berikut :

“Kalau gotong royong itu selalu dilakukan disini, orang perikanan juga biasa datang. Bisa dilihat disini sekarang lingkungannya bersih”. (hasil Wawancara dengan SN pada tanggal 1 Maret 2022).

selaras dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

“Kegiatan gotong royong yang dilakukan seperti membersihkan mesjid, bersih-bersih di lingkungan sekitar pada hari minggu”.
(Hasil wawancara dengan A pada tanggal 1 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa norma-norma sosial yang ada pada masyarakat nelayan Untia Kota Makassar seperti gotong royong, saling membantu merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan hidup. Norma-norma sosial sangat berperan dalam membentuk perilaku-perilaku yang tumbuh di masyarakat nelayan Untia. Pemerintah telah melakukan perannya dengan baik terhadap peningkatan modal sosial masyarakat nelayan Untia.

3. Jaringan sosial

Hasubullah (2010) mendefinisikan jaringan sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok juga disebut jaringan. Kelompok yang dimaksud dimulai dari yang terkecil yaitu keluarga, kelompok kerabatan, komunitas tetangga, kelompok-kelompok asosiasi, organisasi formal dan bentuk-bentuk lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi biasa dalam bentuk formal maupun informal.

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar sebagai berikut :

“ Saling membantu antar masyarakat sudah seperti budaya yang kita miliki karena sudah diperkuat dengan rasa saling percaya satu sama lain. Saat ini juga selain berprofesi sebagai nelayan

saya juga sudah bekerja sebagai buruh berkat yang tidak lepas dari bantuan orang-orang sekitar". (Hasil wawancara dengan M pada tanggal 25 januari 2022

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa jaringan sosial yang dimiliki masyarakat nelayan Untia tidak lepas dari hubungan-hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kekerabatan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemukinan nelayan Untia saat ini dilirik sebagai tempat wisata karena dikampung nelayan Untia terdapat potensi sumber daya alam yaitu tambak ikan nelayan, budidaya hutan *mangrove* dan areal gunung pasir putih yang dijadikan sarana wisata di daerah tersebut. Kampung nelayan Untia juga punya potensi ekowisata di ekosistem *mangrove* Untia antara lain adanya berbagai jenis satwa dalam hal ini burung, *reptile*, ikan, dan kepiting yang bisa menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung di wilayah tersebut. Tentu hal ini tidak lepas dari peran serta pengawasan pemerintah.

Wisata kampung nelayan Untia dikembangkan dimaksudkan untuk ke semua segmen baik dari kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Melihat bahwa masyarakat membutuhkan bebrapa lokasi-lokasi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menikmati sekaligus mencintai lingkungan yang cenderung mencari lokasi wisata untuk berkumpul bersantai bersama keluarga, dan teman-teman. Tentu hal ini juga semakin meningkatkan modal sosial antar sesama masyarakat yaitu saling mengenal satu sama lain.

Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Untia beriringan dengan meningkatnya modal sosial karena salah satu awal bentuk kepercayaan masyarakat antarsesama adalah dengan meningkatnya kesejahteraan. Apabila kesejahteraan masyarakat nelayan Untia meningkat maka unsur modal sosial seperti kepercayaan dan saling membantu tentu meningkat. Dengan itu pemerintah terus melakukan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nelayan Untia.

Hal ini juga tidak lepas dari tujuan direlokasikannya masyarakat pulau Lae-Lae ke Untia adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang tergolong rendah. Namun, melihat kondisi hari ini, pandemi covid 19 seolah olah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat nelayan Untia karena sangat berdampak termasuk pada peningkatan ekonomi itu sendiri serta pergerakan masyarakat yang dibatasi bahkan adanya larangan untuk berkumpul membuat aktivitas-aktivitas sosial masyarakat menjadi terhambat. Pemerintah Kecamatan Biringkanaya tetap melakukan pengawasan terhadap masyarakat pulau Lae-Lae yang di relokasi ke pemukiman Nelayan Untia.

Salah satu keberterimaan hidup yang digunakan masyarakat nelayan Untia adalah dengan bermodalkan sosial. Maka tidak heran ketika masyarakat nelayan Untia memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama bahkan sudah saling menganggap keluarga satu sama lain. Dengan bermodal sosial pula, masyarakat nelayan Untia bahkan mencapai

peningkatan perekonomian melalui jaringan sosial, salah satu contoh proses transaksi jual beli hasil penangkapan ikan tidak menoton pada wilayah kecamatan Untia melainkan mampu menjalin transaksi jual beli juga dari luar daerah kecamatan Untia

Selain hal tersebut pemerintah tetap menjalankan perannya dalam realokasi masyarakat nelayan. Berdasarkan teori burton (2000) Peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial masyarakat Nelayan Untia melalui program-program yang telah dibuat dapat diukur dengan beberapa peran penunjang diantaranya peran alokasi sumber daya, peran regultaor, dan peran kesejahteraan sosial.

1. Peran alokasi sumber daya

Pemerintah sebagai peran alokasi sumber daya adalah memutuskan keterampilan-keterampilan apa yang diperlukan masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosialnya. Demikian pemerintah harus mampu mengalokasikan sumber daya yang tersedia di Untia agar lebih bisa untuk meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Untia

Alokasi sumber daya terkadang didasarkan pada faktor personal maupun politik. Pemanfaatan-pemanfaatan sumber daya yang ada di Untia. Contohnya Penangkapan ikan adalah kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya laut yaitu dengan menangkap ikan dan hewan laut lainnya. Tentu hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah sebagai

alokasi sumber daya dimana pemerintah menfasilitasi kegiatan tersebut dengan adanya pemberian alat tangkap, mesin perahu sampai perahu.

Berdasarkan hasil wawancara di tempat penelitian penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai alokasi sumber daya memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan Untia. Disamping dengan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian berupa mesin, perahu, jaring sebagai mata pencaharian. Peran pemerintah sebagai alokasi sumber daya secara realitas mampu meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat nelayan Untia, terbukti dengan kekuran antar sesama serta masih kentanya aksi gotong royong yang dilakukan. Dan tentunya ini tidak terlepas dari apa yang menjadi program kerja dari pemerintah setempat yaitu mengajak dan melakukan aksi bersih-bersih bersama masyarakat nelayan Untia setiap hari Jumat atau minggu. Sehingga dengan mudah terjalin hubungan sosial dan bahkan menjadikan hubungan sosial sebagai modal untuk bertahan hidup.

2. Peran Regulator

Adapun peran pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan program-program yang dibutuhkan masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

pengelolaan Wilayah Pesisir dimana dalam pasal 36 yang berbunyi “ pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya. Dari Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang dan memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran regulator pemerintah dalam hal meningkatkan modal sosial masyarakat Nelayan Untia sudah efektif dimana program-program yang dijalankan sejauh ini sudah berorientasi pada peningkatan modal sosial masyarakat Nelayan Untia salah satunya yaitu Adanya program pelatihan perbaikan mesin yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa memperbaiki mesinnya sendiri agar tidak lagi mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mesin.

3. Peran Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan semua orang, dimana tercapai dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Biringkanaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Untia adalah dengan memaksimalkan peran serta tanggung jawabnya dari pemerintah

dimana peran dan fungsinya merupakan hal yang penting dilakukan, dimana peranan pemerintah berbentuk dalam sebuah program-program pemerintah kepada masyarakat Untia untuk menunjang kesejahteraan sosial.

Tabel 4.3 Data Jumlah Masyarakat Berpenghasilan rendah dan/atau Terdampak Ekonomi Akibat Covid-19 Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Sasaran	
			Masyarakat Miskin/Berpenghasilan Rendah	Masyarakat Yang Berdampak Covid-19
1.	Untia	2.073	432	249

Dilihat dari tabel diatas, sebanyak 249 masyarakat untia yang berdampak covid-19 pada sektor perekonomiannya. Serta Sebanyak 432 orang berpenghasilan rendah. Dengan adanya covid-19 ini sangat berdampak pada masyarakat nelayan Untia.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintah setempat setelah direlokasikanya masyarakat pulau lae-lae ke Untia, tetap melakukan pengawasan dan pengontrolan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat nelayan Untia setelah dipindahkan, tetapi belum cukup efektif karena belum meratanya pembangunan serta penyaluran bantuan yang diberikan.

Peran pemerintah yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial yang dimainkan oleh pemerintah Dinas perikanan Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, dan Kelurahan Untia dalam melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan serta modal sosial adalah peran

Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, kesaling percaya, dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial tidak hanya sekedar aspek individu, tetapi juga aspek masyarakat. Sebagai atribut dari masyarakat, modal sosial mengacu pada kualitas jaringan dan hubungan yang memungkinkan individu untuk bekerjasama dan bertindak secara kolektif.

1. Kepercayaan

Kepercayaan bagi masyarakat nelayan Untia adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Serta kepercayaan pada masyarakat nelayan Untia adalah sikap saling mempercayai di masyarakat

yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lainnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Kepercayaan bagi masyarakat nelayan Untia Kota Makassar merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Kepercayaan menurut masyarakat nelayan Untia adalah harapan dan keyakinan yang tumbuh dalam diri masyarakat nelayan Untia sehingga mampu berinteraksi antar sesama. Dengan adanya rasa saling percaya terhadap sesama akan menjalin interaksi sosial yang baik tanpa ada sedikitpun kekecewaan didalamnya. Tidak heran ketika melihat masyarakat nelayan Untia Kota Makassar memiliki interaksi sosial maupun kerja sama yang baik karena itu tidak terlepas dari apa yang menjadi kepercayaan satu sama lain.

Dalam ruang lingkup masyarakat nelayan Untia Kota Makassar, kepercayaan juga memiliki fungsi yang sangat penting guna meminimalisasi kemungkinan bahaya atau masalah yang nantinya akan terjadi dari aktifitas apapun dan kapanpun. Dengan adanya kepercayaan antar sesama tentunya masyarakat nelayan Untia Kota Makassar juga memiliki potensi untuk memperbesar kemampuan dalam segi bekerjasama. Dengan kepercayaan orang-orang akan bisa bekerjasama secara efektif. Hal ini terbukti dengan masyarakat nelayan Untia saling meminjamkan alat-alat tangkap antar sesama, sifat kekeluargaan begitu erat, serta dengan adanya kepercayaan yang baik mengakibatkan kurangnya tindakan kriminal antar sesama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa unsur modal sosial yaitu kepercayaan dimana Pemerintah telah melakukan program seperti yang telah disebutkan dalam hal meningkatkan kepercayaan dengan melaksanakan program pembentukan kelompok nelayan dimana dengan terbentuknya kelompok nelayan semakin meningkatnya peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama.

2. Norma sosial

Sama halnya kepercayaan, norma-norma sosial bagi masyarakat nelayan Untia Kota Makassar merupakan hal yang mendasar untuk melakukan interaksi sosial antar sesama karena adanya norma-norma sosial mampu membangun tata cara berperilaku masyarakat nelayan Untia Kota Makassar dalam melakukan segala bentuk aktivitas baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Itulah sebabnya kerukunan dan kekeluargaan masih sangat melekat dalam diri masyarakat nelayan Untia Kota Makassar karena masih menerapkan norma-norma sosial yang ada.

3. Jaringan sosial

Dalam ruang lingkup masyarakat nelayan Untia Kota Makassar sangat penting yang namanya jaringan sosial karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Melihat lingkungan masyarakat nelayan Untia telah didominasi dengan sistem kekeluargaan dikarenakan jaringan sosial yang semakin diperluas sehingga memperoleh keuntungan antar

sesama. Bagi masyarakat nelayan Untia hubungan-hubungan yang terjadi antar individu maupun kelompok guna menjalin kerjasama yang baik.

Salah satu bentuk penggunaan jaringan sosial antar sesama masyarakat Untia adalah adanya saling pinjam meminjam bantuan yang diberikan pemerintah yaitu perlengkapan berlaut dan mendapatkan pekerjaan dari relasi pertemanan.

Dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara realitanya ketiga indikator peran pemerintah dan modal-modal sosial yang digunakan masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidupnya. Dimana masyarakat nelayan Untia yang dulunya merupakan masyarakat pulau harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yaitu dengan penduduk lain yang sudah menetap lebih dulu di daerah tersebut dan kehidupan sosial yang sudah terbentuk lama.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah telah menjalankan perannya sebagaimana tupoksinya dalam meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan hidup masyarakat nelayan Untia Kota Makassar. Namun Program-program penunjang peningkatan modal sosial yang dibuat pemerintah seperti pembentukan kelompok nelayan belum merata sehingga bantuan yang dirasakan oleh masyarakat setempat tidak sepenuhnya. Tetapi secara keseluruhan program-program yang dibuat pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Untia yang tentu juga meningkatkan modal sosial yaitu rasa percaya dan saling membantu. Adapun intervensi pemerintah adalah pemerintah ikut andil dalam melakukan aksi-aksi sosial seperti gotong royong yang mampu meningkatkan modal sosial antar sesama masyarakat.

Dalam hal pengawasan setelah pemindahan masyarakat nelayan pulau Lae-Lae ke Untia itu sudah bagus dimana perannya terbagi menjadi 3 peran penunjang yaitu :

1. Peran alokasi sumber daya, yang mana peran ini meliputi pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah Untia Kota Makassar, didukung dengan program pemerintah seperti pemberian alat pancing, jaring, mesin, serta perahu.

2. Peran regulator, meliputi pelatihan kerajinan tangan dan pelatihan memperbaiki mesin.
3. Peran kesejahteraan sosial, meliputi pemberian sembako, bantuan air bersih, menyediakan lahan perumahan, serta pemberian sertifikat tanah.

Modal sosial yang ada terjalin sangat baik dimana sesama masyarakat nelayan Untia sudah menganggap keluarga satu sama lain. Adapun Modal Sosial yang digunakan masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar untuk bertahan hidup adalah :

1. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat nelayan Untia berupa sikap jujur, saling percaya satu sama lain.
2. Norma-norma sosial yang dimiliki masyarakat nelayan Untia mereka memiliki rasa toleransi, gotong royong dan saling membantu yang tinggi.
3. Jaringan sosial dimana jaringan sosial masyarakat nelayan Untia didalamnya berupa relasi/hubungan yang baik antar sesama.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian serta pengawasan yang lebih terhadap peningkatan modal sosial masyarakat nelayan Untia Kota Makassar.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan Masyarakat nelayan Untia agar bantuan yang diberikan merata. Pemerintah perlu memberikan fasilitas sertifikat rumah secara menyeluruh kepada masyarakat nelayan

yang direlokasikan agar masyarakat tidak merasa bingung mengenai tempat tinggalnya.

3. Diharapkan dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan pemerintah mampu meningkatkan modal sosial masyarakat nelayan Untia.
4. Diharapkan pemerintah tetap lebih sigap dalam menyalurkan bantuan di masa pandemi ini.
5. Diharapkan Bagi masyarakat nelayan Untia Kota Makassar mampu menjaga modal sosial yang ada untuk keberlanjutan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelifka, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi Centre Point of Indonesia Di Kawasan Pesisir Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Akhmaddhian, S. (2017). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-13.
- Barton, H., (2000). *Urban Form and Locality, Sustainable Communities: The Potential for eco-neighbourhoods*. London: Earthscan
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2021). *Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo*. In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 1, No. 1, pp. 131-144).
- Darwin, (2005). *Pemberdayaan masyarakat miskin*. Indonesia Social Economic Outlook.
- Diyanayati, Kissumi., & Padmiati, E. (2017). *Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan di Sulawesi Selatan*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(2), 199-214.
- Fukuyama, F. (2014). *Tatanan politik dan pembusukan politik: Dari revolusi industri ke globalisasi demokrasi*. Macmillan.
- Fukuyama, Francis, (1995). *Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani, Penerbit Qalam.
- H a m s a h, (2017). *Modal Sosial Dalam Program Makassar Tidak Rantasa*. Jakarta. MIB Indonesia
- Hasbullah (2006) "Bentuk ModaL Sosial ", *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. hlm.7
- Irwan, I. (2015). *Strategi Bertahan Hidup Perempuan Penjual Buah-buahan (Studi Perempuan di Pasar Raya Padang Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat)*. Humanus, 14(2), 183–195.
- Irwan, (2015) Ishak S, H. (2014). *Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Kelurahan Mafututu Kota Tidore Kepulauan*. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture.

- Kondjol & Pieters, (2010) *Peranan Pemeritah Daerah dalam meningkatkan kapasitas nelayan marginal di Kabupaten Sorong Selatan*. Tesis S2 Ilmu Politik
- Nyoman, Sumaryadi, I. (2010). *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pranaji (2006). *Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering*. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24, No. 2, Oktober 2006
- Putnam, R.D.et.al, 1993. *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2009). *Diversity, social capital, and immigrant integration: Introductory remarks*. *National Civic Review*, 98(1), 3-6.
- Rassanjani, S., Harakan, A., Pintobtang, p., & Jermstiparsert, K. (2019). *Social Protection System To Reduce Poverty In A Natural Resource Rich Country: Towards The Success Of The Sustainable Development Goals*. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 7(8), 104-126.
- Rivai & Darsono, (2015). *Strategi bertahan hidup*. *Journal Of Social and Cultur*
- Riyadi, (2014). *Kebijakan pengembangan wilayah dan kota*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resnawaty, R. (2016). *Strategi Komunitas Prakis dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- Siagian, P. Sondang (2009). *Adminisrasi pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Scheiber, Laura Ann. (2014). *Social capital and the target population*. *Social Enterprise Journal*, 10 (2), 121-134.
- Solikutun & Nuning J (2018) *Modal Sosial Sebagai Srategi Bertahan Hidup Masyarakat Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(2).
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Pnelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.

Suryaningsi, T. (2020). *Pola Permukiman Nelayan Untia Di Kota Makassar*. Walasuji: Jurnal Sejarah Dan Budaya, 7(1), 169–184. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v7i1.94>

Thomas S (2020). *Memahami Modal Sosial*. Surabaya. CV Saga Jawadwipa

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Wijaya, Yudha sena (2019). *Modal sosial sebagai strategi bertahan hidup masyarakat pemukiman kumuh: Studi di RT 16, RW 04, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).



L

A

M



N



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alaiddin No.259 Makassar 90221 Telp.0411) 8566972,881593, Fax.0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fitriah Awalia Salim
NIM : 105641108318
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Amplitude Batas
1	Bab 1	9 %	
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

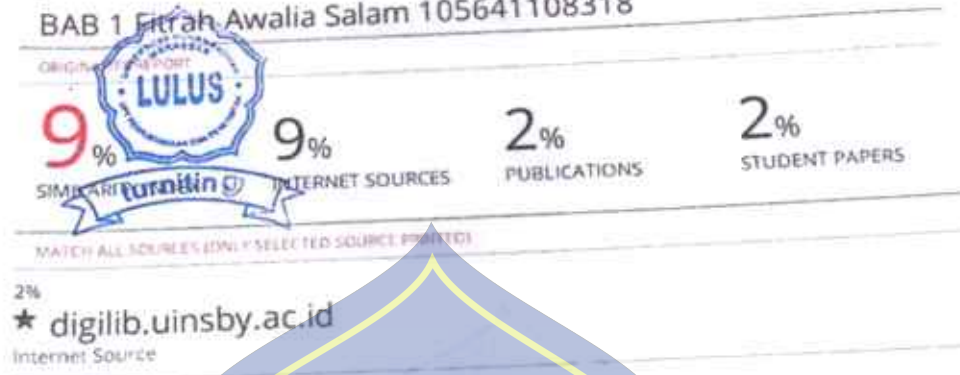
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 22 April 2022 /
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Nursinah S. Ham M.P.
NIM. 864391

BAB 1 Fitrah Awalia Salam 105641108318



BAB 2 Fitrah Awalia Salam 105641108318

ORIGINALITY REPORT			
18% SIMILARITY INDEX	16% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	15% STUDENT PAPERS
MATCHES FOUND: 1 (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)			
2% ★ etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source			



BAB 3 Fitrah Awalia Salam 105641108318

ORIGINAL

6%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper



BAB 4 Fitrah Awalia Salam 105641108318



6%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCES PRINTED)

3%

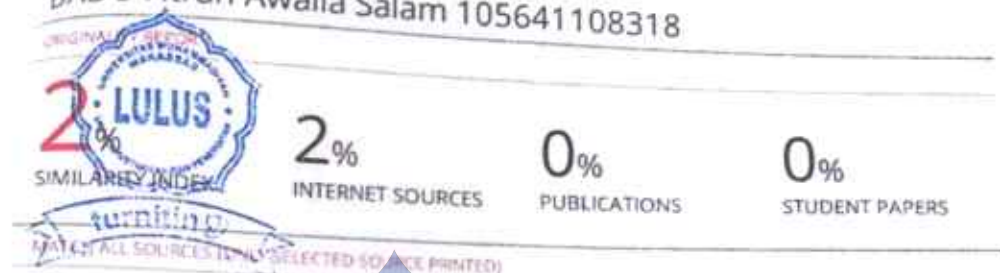
★ georegionalindonesia.blogspot.com

Internet Source



CS Scanned with CamScanner

BAB 5 Fitrah Awalia Salam 105641108318



2%
★ ddd.uab.cat
Internet Source



Susuman Tini Penguji Ujian Tulis Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Sabtu, 19 April 2022, Jam : 13.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA KONGRESMAN	JUDUL	KOORDINATOR	PENCACU
1	10564 31043 1B	Fitra Azzahra Salam	Peran Pemerintah dalam Menegakkan Kebijakan untuk Kemandirian Masyarakat (Studi Kasus: Negeri Uluks Kula Malaysia)	1. Dr. H. Nurhanik Halim, M.Si 2. Nur Hanik, S.Sn, M.A.P	1. Dr. H. Nurhanik Halim, M.Si (Pencac)
2	10564 31030 1B	Ahmi Iwar	Implementasi Kebijakan Keadilan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Dr. Nurhanik Halim, S.Sn, M.Si 2. Nur Hanik, S.Sn, M.A.P	1. Dr. Nurhanik Halim, M.Si (Pencac) 2. Nur Hanik, S.Sn, M.A.P

Minister, 18 April 2022
Deben

Dr. H.G. Bryant, 224115, 5, 503, M. 50
NINE : 730727

Sesungguhnya Peneliti Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malaysia
Hari Rabu, 27 April 2022, Jam: 10.30 - 12.00 Wita

NO	STASIUN	NAMA MASUKAN	RUANG	KANTIN	REKAM
1	STASIUN 1				
2	STASIUN 2				
3	STASIUN 3				
4	STASIUN 4				
5	STASIUN 5				
6	STASIUN 6				
7	STASIUN 7				
8	STASIUN 8				
9	STASIUN 9				
10	STASIUN 10				
11	STASIUN 11				
12	STASIUN 12				
13	STASIUN 13				
14	STASIUN 14				
15	STASIUN 15				
16	STASIUN 16				
17	STASIUN 17				
18	STASIUN 18				
19	STASIUN 19				
20	STASIUN 20				
21	STASIUN 21				
22	STASIUN 22				
23	STASIUN 23				
24	STASIUN 24				
25	STASIUN 25				
26	STASIUN 26				
27	STASIUN 27				
28	STASIUN 28				
29	STASIUN 29				
30	STASIUN 30				
31	STASIUN 31				
32	STASIUN 32				
33	STASIUN 33				
34	STASIUN 34				
35	STASIUN 35				
36	STASIUN 36				
37	STASIUN 37				
38	STASIUN 38				
39	STASIUN 39				
40	STASIUN 40				
41	STASIUN 41				
42	STASIUN 42				
43	STASIUN 43				
44	STASIUN 44				
45	STASIUN 45				
46	STASIUN 46				
47	STASIUN 47				
48	STASIUN 48				
49	STASIUN 49				
50	STASIUN 50				
51	STASIUN 51				
52	STASIUN 52				
53	STASIUN 53				
54	STASIUN 54				
55	STASIUN 55				
56	STASIUN 56				
57	STASIUN 57				
58	STASIUN 58				
59	STASIUN 59				
60	STASIUN 60				
61	STASIUN 61				
62	STASIUN 62				
63	STASIUN 63				
64	STASIUN 64				
65	STASIUN 65				
66	STASIUN 66				
67	STASIUN 67				
68	STASIUN 68				
69	STASIUN 69				
70	STASIUN 70				
71	STASIUN 71				
72	STASIUN 72				
73	STASIUN 73				
74	STASIUN 74				
75	STASIUN 75				
76	STASIUN 76				
77	STASIUN 77				
78	STASIUN 78				
79	STASIUN 79				
80	STASIUN 80				
81	STASIUN 81				
82	STASIUN 82				
83	STASIUN 83				
84	STASIUN 84				
85	STASIUN 85				
86	STASIUN 86				





**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
UIN Ar-Raniry - Universitas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Makassar Jalan 5 - Jalan Sultan Muhammad Sya 299 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 9721 Fax: (0411) 866 9700
E-mail: fasil@unismuh.ac.id
Official Web: Ar-raniry / unismuh.ac.id



PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 1725/A.3-II/XII/1443/2021

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Fitrah Awalia Salam

Stambuk : 105641108318

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Media Sosial sebagai Strategi Keberhasilan Masyarakat (Studi Pengkajian Nelayan Ulinia Kota Makassar)"

Pembimbing I :

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II :

Hamrun, S.IP, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggung jawab, di serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada tanggal : 04 Desember 2021

Dekan,

(Signature)
Muhammad Ali, M.Si, S.Pd

Terdapat Kepada Ytu,

1. Pembimbing I

2. Pembimbing II

3. Ketua Jurusan

4. Mahasiswa yang bersangkutan

5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Umat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Website: www.unismuh.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Shura Kira Latta No. Jalan Sultan Alauddin No. 208 Makassar 90224

Telp: (0411) 846 977 Fax: (0411) 846 976

Official Email: info@unismuh.ac.id

Official Web: <http://unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor
Lamp.
Hal

051/FSP/A.1-VIII/I/1443 H/2022 M.

1 (satu) Eksemplar

: Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, C/ Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data
dalam rangka Penulisan Skripsi, maka dengan ini kepada Bapak/Ibu kiranya
dapat memberikan Izin untuk Penelitian kepada

Nama Mahasiswa : Fitrah Awaia Salim

Stambuk : 10564 11083 18

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Judul Skripsi : "Peran Pemerintah Kecamatan Biringkanaya dalam
Meningkatkan Modal Sosial sebagai Strategi
Keberhasilan Masyarakat (Studi Pemukiman
Nelayan Utara Kota Makassar)"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khairan Katiraa

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 13 Januari 2022

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I

A. Luthfi Prianto, S.IP, M.SiP
NBM: 992 797

Scanned with CamScanner



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humanity

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

R. Sultan Alauddin No. 219 Telp: 0411/904972 Fax: 0411/904558 Makassar 90221 E-mail: dp1muhammadiyah@plaza.com



Nomor : 144/05/C 4-VIII/1/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Jumadil akhir 1443 H

13 January 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 051/FSP/A.1-VIII/1/1443/2022 tanggal 13 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : FITRAH AWALIYAH SALAM

No. Stambuk : 10564 1108318

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peran Pemerintah Kecamatan Biringkanaya dalam Meningkatkan Modal Sosial sebagai Strategi Ketertahanan Masyarakat (Studi Pemukiman Nelayan Untia Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Januari 2022 s/d 17 Maret 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khairan katsiraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

01-22

Materi LP3M

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBA1 101 7716



Scanned with CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25573/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

d-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPJM UNISMU Makassar Nomor : 144/05/C.4-VIII/U43/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FITRAH AWALIA SALAM
Nomor Pokok : 105541108318
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

"PERAN PEMERINTAH KECAMATAN BIRINGKANAYA DALAM MENINGKATKAN MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI KEBERTAHANAN MASYARAKAT (STUDI PEMUKIMAN NELAYAN UNTIA KOTA MAKASSAR)"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Januari s/d 17 Maret 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Makassar
Pada tanggal : 17 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 50111

Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 24 Januari 2022

Kepada

Yth. 1. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
PERTANIAN KOTA MAKASSAR
2. CAMAT BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Di –

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 193 -II/BKBP/2022

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2557/SJ.01/PTSP/2022, Tanggal 17 Januari 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada

Nama

FITRAH AWALIA SALAM

NIM / Jurusan

105641108316 / Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan

Mahasiswa (S1) UNISMUH

Tanggal pelaksanaan

24 Januari s/d 17 Maret 2022

Jenis Penelitian

Stroptis

Alamat

Jl. Sr Alauddin No. 259, Makassar

Judul

"PERAN PEMERINTAH KECAMATAN BIRINGKANAYA DALAM MENINGKATKAN MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI KEBERTAHANAN MASYARAKAT (STUDI PEMUKIMAN NELAYAN LINTA KOTA MAKASSAR)"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabokesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KESBANGPOL

UB

SEKRETARIS,

DR. HARI, S.P., S.H., M.H., M.Si

Pangkat Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang mengajukan permohonan izin penelitian;
7. Arsip.



amScanner



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN BIRINGKANAYA**

Jl. Prof. DR. Ir. SUTARNI Telo, (0411) 4720763, Makassar 90241



Nomor : 070/ 29 /KBRK/I/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Lurah Untia
Di Makassar

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dan Badan Keuangan Bangsa dan Politik Nomor 070/133-II/KBRK/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa:

Nama
NIM
Pekerjaan
Alamat
Judul

UTIRAH AVALIA SALAM
005641108318

Mahasiswa (S1) UNISMU
Jl. Sri Auidin No. 259 Makassar

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN BIRINGKANAYA DALAM
MENINGKATKAN MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI
KEBERKHAIRAN MASYARAKAT (STUDI PEMUKIMAN
SELAIN UNTIA KOTA MAKASSAR)**

Bermaksud mengadakan Penelitian pada instansi / Wilayah Bapak/Ibu dalam rangka Pengambilan Data yang akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Januari s/d 17 Maret 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat memenuhinya dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Dengan surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Januari 2022

1. Camat Biringkanaya
Ka Subag Umum & Kepegawaian

MUHAMMAD SYARIF, SE.,MSi
NIM 19780508 201001 1 007

PEDOMAN WAWANCARA

Aparat Dinas Kelautan

1. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai kualitas hidup nelayan untia kota Makassar, apakah ada ?
2. Apa saja regulasi dalam hal usaha perikanan yang ada di kota Makassar yang dilakukan dinas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup nelayan untia kota Makassar ?
3. Apakah ada data mengenai pengolahan data? Penyimpanan data? Penyajian data? Dan penyebaran data potensi perikanan di kota makassar terkhusus di daerah Untia serta data sosial ekonomi yang terkait pengelolaan perikanan di Untia?
4. Bagaimana dinas menumbuh kembangkan masyarakat Untia?
5. Penelitian apa saja yang sudah dilakukan dalam hal pengembangan sektor perikanan di Untia kota Makassar ?
6. Mengenai newport yang ada di untia apakah ada program yang dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat nelayan untia

Aparat Kecamatan Biringkanaya

1. Mengenai masalah nelayan Lae-Lae yang direlokasika ke desa Untia pada tahun 1998 apakah yang dilakukan pemerintah kecamatan Biringkanaya dalam hal pengawasan terhadap pemindahan tersebut? Bagaimana pemerintah kecamatan menindak lanjutinya ?
2. Bagaimana peran pemerintah kecamatan Biringkanayadalam hal meningkatkan kualitas hidup nelayan Untia?
3. Bagaimana peran kecamatan Biringkanaya dalam meningkatkan modal sosial sebagai strategi keberlanjutan masyarakat di Untia? Yang mencakup :
 - Peran alokasi sumber daya mencakup penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian sehingga mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan Untia.
 - Peran regulator adalah tentang norma-norma, aturan undang-undang yang dibutuhkan masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial.
 - Peran kesejahteraan sosial mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial masyarakat nelayan Untia untuk meningkatkan modal sosial.
4. Bantuan apa saja yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat Untia?

5. Adakah program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan modal sosial antar sesama masyarakat nelayan Untia?
6. Data profil kecamatan/untia

Aparat Desa Untia

1. Berapa jumlah masyarakat Untia? Berapa yang berprofesi sebagai nelayan?
2. Bagaimana kondisi/keadaan masyarakat nelayan Lae-Lae setelah direlokasikan ke Untia, apakah ada peningkatan kualitas hidup?
3. Apakah ada program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan Untia?
4. Bagaimana modal sosial yang digunakan masyarakat nelayan Untia ?
 - Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan yang tumbuh dalam diri masyarakat nelayan Untia sehingga mampu berinteraksi antar sesama.
 - Norma adalah aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat nelayan Untia yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan hidup.
 - Jaringan sosial adalah relasi antar sesama masyarakat nelayan Untia.
5. Data Profil desa untia
6. Mengenai newport bagaimana menanggapinya ?

Masyarakat

1. Bagaimana modal sosial yang digunakan masyarakat yang terdiri kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang digunakan masyarakat agar bisa bertahan hidup? Yang mencakup :
 - Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan yang tumbuh dalam diri masyarakat nelayan Untia sehingga mampu berinteraksi antar sesama.
 - Norma adalah aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat nelayan Untia yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan hidup.
 - Jaringan sosial adalah relasi antar sesama masyarakat nelayan Untia.
2. Bagaimana mempertahankan modal sosial tersebut?
3. Apa yang dilakukan pemerintah dalam hal meningkatkan modal sosial tersebut? Bagaimana pemerintah menjalankan perannya?
4. Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat ?
5. Mengenai newport
6. Bagaimana peran pemerintah setelah relokasi?

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Fitrah Awalia Salam, lahir pada tanggal 26 Desember 2000 di Kombong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan bapak Abdul Salam Idris dan Ibu Rina Maddusa, penulis menyelesaikan pendidikan dibangku SDN 27 Padang-Padang tamat pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Belopa tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2018. Penulis Pernah aktif pada Lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan HIMJIP. Penulis mendapatkan gelar S1 Pada program studi Ilmu pemerintahan dengan Judul “Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Modal Sosial untuk Keberhasilan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Nelayan Untia Kota Makassar)”.